

MODEL PENDIDIKAN KEPARIWISATAAN

Oleh : Darsiharjo

Abstraks

Pada tanggal 18 Februari 2008 Dirjen Dikti telah menyetujui bahwa pariwisata sebagai suatu disiplin ilmu mandiri dan dapat dibuka untuk jenjang S1, S2, dan S3 di Indonesia. Persetujuan ini sebagai tonggak mulai berkembangnya ilmu kepariwisataan di Indonesia, karena selama ini kepariwisataan baru terbatas pada pendidikan vokasi yaitu pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Persoalannya adalah apakah kita sudah siap untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik yaitu pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu ? karena untuk menyelenggarakan pendidikan akademik memerlukan Pengelola Sumber Daya Manusia (PSDM) dan model pembelajaran yang berbeda dengan pendidikan vokasi.

Untuk mengembangkan model pendidikan vokasi ke model pendidikan akademik memerlukan pengkajian yang cermat dan seksama baik dalam muatan materi kurikulum maupun dalam sistem pembelajarannya termasuk tenaga pengajarnya harus dapat membedakan sampai batas mana untuk vokasi dan sampai batas mana untuk akademik.

Kata kunci : Pendidikan, dan Kepariwisataan

PENDAHULUAN

Perjuangan insan pariwisata untuk meng-goal-kan bahwa pariwisata sebagai suatu disiplin ilmu mandiri dan mendapat izin pembukaannya pada jenjang S1, S2, dan S3 di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Karena masih terus memperdebatkan batang tubuh ilmu kepariwisataan itu sendiri, walau pun sudah diyakinkan melalui pemaparan filsafat ilmu bahwa syarat ilmu memerlukan tiga persyaratan yaitu aspek ontologi (objek atau focus of interest yang dikaji), aspek epistemologi (metodologi untuk memperoleh

pengetahuan), dan aspek aksiologi (nilai manfaat pengetahuan bagi kehidupan); ketiga persyaratan tersebut sudah terjawab oleh ilmu kepariwisataan (Himawan B dan Kusmayadi, 2008). Sekarang persoalannya adalah semua insan pariwisata harus percaya diri dan meyakini bahwa apa yang kita pelajari dan kita kaji adalah suatu ilmu.

Secara historis suatu disiplin ilmu tertentu (misalnya matematika) tidak memerlukan surat pengakuan atau surat keputusan bahwa matematika sebagai suatu ilmu. Karena ilmu bersifat universal dan berlaku di mana saja yang memihak pada keadilan dan kebenaran. Tetapi kalau untuk mendirikan atau menyelenggarakan pendidikan ilmu tertentu memang harus memerlukan izin yaitu dari departemen pendidikan nasional (untuk Indonesia). Yang penting kita harus terus berjuang meyakinkan kepada masyarakat melalui penelitian, pendidikan, dan karya nyata dari ilmu yang dihasilkan, agar masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari ilmu yang kita tekuni.

Berbicara ilmu pariwisata tidak hanya berbicara ilmu pada tingkat perguruan tinggi saja melainkan harus mulai dari sekolah dasar bahkan sebelum anak mulai sekolah (usia dini), karena pariwisata bukan merupakan keterampilan tertentu yang hanya dapat dipelajari satu atau dua semester kemudian selesai, melainkan suatu ilmu yang memerlukan pemikiran yang komprehensif yang diturunkan dari cita-cita pembangunan nasional, dalam rangka mengokohkan IPOLEKSOSBUDHANKAM Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersahabat dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi. Inilah tantangan yang harus dijawab oleh semua insan kepariwisataan (Ardike, 2008).

PERGESERAN ORIENTASI PENDIDIKAN VOKASI KE PENDIDIKAN AKADEMIK

Pendidikan vokasi tidak dapat perbandingan dengan pendidikan akademik, begitu juga sebaliknya. Karena keduanya model pendidikan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pendidikan vokasi berdasarkan penjelasan pasal 15 UU 20 Tahun 2003 merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu maksimal setara dengan program sarjana, sedangkan pendidikan

akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu (Azahari, 2008).

Pendidikan vokasi kelebihannya sangat siap untuk memasuki dunia kerja karena telah dibekali pekerjaan dengan keahlian tertentu, sedangkan pendidikan akademik belum siap untuk memasuki dunia kerja karena tidak dibekali pekerjaan dengan keahlian tertentu sehingga harus memerlukan penyesuaian terlebih dahulu.

Kelemahan pendidikan vokasi adalah dalam hal penjurangan pekerjaan, karena dalam dunia kerja sangat dinamis dan biasanya mengalami kenaikan jabatan mulai dari level paling rendah sampai pada level yang paling tinggi. Manakala pegawai yang berlatar belakang pendidikan vokasi dinaikkan ke jabatan yang lebih tinggi biasanya mengalami kesulitan dalam hal kemampuan berfikir komprehensif dan analitiknya sehingga memerlukan tambahan pendidikan akademik.

Kelebihan pendidikan akademik adalah dalam hal penjurangan pekerjaan, walaupun dalam dunia kerja sangat dinamis dan biasanya mengalami kenaikan jabatan mulai dari level paling rendah sampai pada level yang paling tinggi. Bagi pegawai yang berlatar belakang pendidikan akademik dinaikkan ke jabatan yang lebih tinggi biasanya tidak mengalami kesulitan karena memiliki kemampuan berfikir komprehensif dan analitik yang kuat.

Yang menjadi persoalan perlukah menghapus pendidikan vokasi dan diganti dengan pendidikan akademik ? Jawabannya tentu tidak. Karena walaupun bagaimana pendidikan vokasi masih sangat dibutuhkan untuk level tertentu, yang penting adalah manakala yang bersangkutan sudah mentok pada jenjang tertentu maka disarankan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam bentuk pendidikan akademik.

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah boleh lulusan D3 atau D4 melanjutkan ke jenjang pendidikan akademik ? Jawabannya tentu dibolehkan, tetapi bukan berarti dari D3 ke S1 dapat diselesaikan dalam satu tahun lagi, atau dari D4 ke S1 tinggal konversi dan tidak perlu kuliah dan langsung lulus. Tetapi harus dibekali dengan mata kuliah keilmuan yang jumlah sks tertentu yang bobot

keilmuannya lebih banyak yang kemungkinan baru dapat diselesaikan dalam waktu tiga semester.

Kalau begitu bagi peserta yang mengikuti pendidikan vokasi jenjang D3 dirugikan ? jawabannya tentu tidak, karena memang jenjang D3 tidak disiapkan untuk melanjutkan pendidikan melainkan disiapkan untuk bekerja. Kalau cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tidak disarankan untuk masuk pendidikan vokasi tetapi masuk ke pendidikan akademik (S1) sehingga dapat melanjutkan ke S2 sampai S3.

Oleh karena itu bagi lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan vokasi tidak perlu minder dan kemudian mengubah menjadi pendidikan akademik, karena akan terjadi kekosongan kebutuhan tenaga kerja pada level tertentu, yang paling berbahaya apabila kekosongan tenaga kerjanya diisi oleh lembaga pendidikan yang model pembelajarannya kurang profesional akan menyebabkan rusaknya industri kepariwisataan nasional. Oleh karena itu semangat untuk mengubah atau menambah pendidikan vokasi ke atau dengan pendidikan akademik harus diselaraskan dengan statuta atau visi dan misi lembaga yang bersangkutan.

URGENSI MODEL PENDIDIKAN VOKASI

Model pendidikan vokasi sampai kapan pun akan tetap dibutuhkan, karena suatu industri terutama industri pariwisata akan memerlukan tenaga kerja yang siap pakai dalam hal kemampuan bekerja dan keterampilannya. Di dunia industri pariwisata sangat tidak mungkin seseorang yang baru selesai dari pendidikan kemudian ditempatkan sebagai manager (kecuali sang pemilik industri tersebut), biasanya ditempatkan pada level yang kosong bahkan ditempatkan pada level yang paling bawah, kemudian setiap hari atau minggu atau bulan bahkan tahun akan mengalami progress, sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kecakapan dalam bidang pekerjaannya.

Berikut ini salah satu contoh urgensinya model pendidikan vokasional, hasil penelitian di salah satu anjungan Jawa Barat TMII, menunjukkan bahwa ternyata kondisi keorganisasian bidang kepariwisataan belum banyak didukung oleh SDM yang profesional, selain sebagian besar berpendidikan yang kurang

memadai tetapi juga tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Berikut adalah contoh data karyawan di anjungan Jawa Barat di Taman Mini Indonesia Indah.

Tabel 1: Kualifikasi Para Pengelola Di Anjungan Jawa Barat TMII

| Bagian | Asal Pendidikan | Jurusan | Jumlah Pegawai |
|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| Ka Balai Anjungan | Aktripa Bandung | Akademi Tari & Pariwisata | 1 |
| Kasubbag TU | Unpad | Sastra Sunda | 1 |
| Kasi Pameran | - | - | 1 |
| Kasi Pagelaran | STSI | Seni Karawitan | 1 |
| Pelaksana | STMN Garut | Mesin | 1 |
| Pelaksana | SMAN Tasik | IPS | 1 |
| Pelaksana | KPAA Jakarta | TU | 1 |

Sumber : Darsiharjo dkk, 2006

Tenaga profesional yang dianggap unggul atau profesional oleh pengelola ternyata jika memiliki pendidikan manajemen kepariwisataan yaitu setidaknya D3, selain itu mampu bahasa Inggris yang aktif untuk melayani wisatawan asing. Lulusan yang diharapkan oleh para pengelola pariwisata antara lain mereka yang siap kerja sehingga pihak perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengadakan diklat. Jadi dengan model pendidikan vokasi maka perusahaan/industri pariwisata dapat menghemat anggaran diklat bagi karyawan baru, karena kalau lulusan pendidikan vokasi telah dididik dengan berbagai keahlian yang siap pakai.

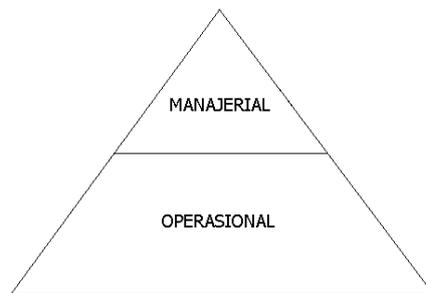
Yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah kebijakan pemerintah ke depan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah akan membalik model pendidikan, yang tadinya 80% model pendidikan akademik (SMA) dan 20% model pendidikan vokasi (SMK), maka ke depan akan dibalik menjadi 80% model pendidikan vokasi (SMK), dan 20% model pendidikan akademik (SMA). Hal ini perlu disiapkan guru atau tenaga pengajar yang betul-betul menguasai pendidikan vokasi, disinilah urgensinya model pendidikan vokasi di masa yang akan datang.

URGENSI MODEL PENDIDIKAN AKADEMIK

Model pendidikan akademik diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan,

melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu melakukan penelitian untuk mengembangkan dan mencipta pengetahuan, dan teknologi dalam bidang keahliannya (Pitana dkk, 2007).

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang memerlukan pemikiran dan daya analisis yang komprehensif, memang sangat memerlukan tenaga-tenaga yang berasal dari lingkungan pendidikan akademik mulai dari level S1 sampai pada level S3. Tetapi persoalannya jumlah kebutuhan tenaga untuk bidang manajerial sangat terbatas seperti pada gambar berikut ini.



Oleh karena itu tidak berarti semua jenjang pendidikan harus memburu pada jenjang akademik, tetapi harus tetap ada jenjang vokasional untuk menutupi kebutuhan tenaga operasional. Kecuali kalau semua industri kepariwisataan sudah menggunakan mesin-mesing canggih sehingga tidak diperlukan tenaga operasional, maka bisa jadi bidang vokasional ditutup dan dijadikan bidang akademik. Tetapi nampaknya ke depan 10 sampai 20 tahun ke depan tenaga operasional masih tetap dibutuhkan, terutama dalam bidang usaha jasa layanan seperti bidang kepariwisataan.

PENJENJANGAN PENDIDIKAN

Pendidikan kepariwisataan diperlukan penjenjangan dalam arti tingkat pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi. Mengingat bidang kepariwisataan merupakan industri yang melibatkan semua komponen, bukan hanya pemilik dan pelaku usaha kepariwisataan tetapi masyarakat sekitarnya ikut mewarnai dan mempengaruhi. Oleh karena itu pendidikan kepariwisataan mestinya menggunakan prinsip “Tourism Education for All” seperti yang isyaratkan dalam pembangunan pariwisata masa depan dengan menggunakan konsep CBTD (community Base Tourism Development) yaitu pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bukan hanya masyarakat (sosial budaya) sekitar yang harus diperhatikan dalam pengembangan kepariwisataan, melainkan aspek lingkungan, dan aspek ekonomipun harus dipertimbangkan seperti pada gambar berikut ini.



Mengenai penjenjangan pendidikan kepariwisataan, dapat diikuti seperti tabel berikut ini.

Tabel 2: Keahlian yang harus dimiliki tiap jenjang pendidikan kepariwisataan

| No. | Jenjang pendidikan | Keahlian yang harus dimiliki |
|-----|-----------------------------|---|
| 1 | Sekolah Dasar (SD s/d SLTP) | Menghormati, membantu, membuat lingkungan bersih dan aman |
| 2 | Sekolah Menengah (SLTA) | Menghormati, memahami, membantu, mengetahui potensi wisata daerah |
| 3 | Program Diploma I | Menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya di bawah bimbingan. |
| 4 | Program Diploma III | Menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya |
| 5 | Program Diploma IV | Menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi dalam bidang keahliannya |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 6 | Program Sarjana (S1): | Menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu melakukan penelitian untuk mengembangkan dan mencipta pengetahuan, dan teknologi dalam bidang keahliannya |
|---|-----------------------|---|

Sumber : Pitana dkk, 2007 dan penulis

MODEL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH

Kepariwisata merupakan ilmu yang harus disampaikan sejak dini yaitu sejak anak-anak duduk di bangku Sekolah Dasar. Tentunya tidak harus dalam bentuk mata pelajaran sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, tetapi memiliki muatan kepariwisataan baik yang bersifat lokal maupun nasional bahkan global.

Anak-anak harus diajak untuk memahami dan mengamati di lingkungan sekitar sekolah atau di tempat-tempat yang biasa rampai dikunjungi pada waktu libur atau waktu-waktu tertentu. Kemudian anak diajak berfikir bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi untuk menikmati dan mengunjungi tempat-tempat tertentu yang dianggap menarik.

Fenomena tersebut biasanya akan menimbulkan gerak penduduk (mobilitas penduduk) sehingga akan memerlukan sarana tertentu misalnya angkutan, akomodasi, tempat makan, dan tempat rekreasi. Kesemuanya apabila ditata dengan baik akan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kemudian diberi pemahaman bahwa kita sebagai penduduk asli perlu memiliki sikap ramah, terbuka, dan membantu mereka tanpa harus mengorbankan perilaku dan budaya yang kita pegang selama ini. Sikap-sikap tersebut akan menimbulkan rasa nyaman, ingin tinggal lama di tempat rekreasi, dan rasa bersahabat diantara wilayah dan daerah.

Pariwisata tidak harus dengan biaya investasi yang tinggi atau teknologi canggih, dengan berperilaku apa adanya sesuai dengan norma dan budaya yang dipegang akan membuat orang lain penasaran ingin tahu dan ingin mengunjungi, ditambah dengan sifat disiplin, bersih, dan penciptaan rasa aman. Hal-hal

semacam inilah yang harus diajarkan pada anak sekolah dasar sampai menengah. Bentuk pembelajarannya dapat dilakukan dengan cara study wisata ke tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh mereka.

MODEL PENDIDIKAN DI PENDIDIKAN VOKASI

Pendidikan vokasi yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan kepariwisataan telah berjalan cukup baik, hal ini jika dilihat dari indikator banyaknya lulusan pendidikan vokasi yang diserap di lapangan kerja, bahkan di Lembaga Pendidikan Vokasi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung hampir semuanya diserap oleh lapangan kerja. Jika menggunakan indikator serapan tenaga kerja, sebetulnya lembaga pendidikan vokasi harus tetap dipertahankan, tinggal dibenahi mutu dan kualitasnya setiap tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi yang ada.

Tenaga pendidik di lembaga vokasi harus memiliki keterampilan yang tinggi, karena akan membekali anak didik dalam bidang keterampilan pekerjaan pada bidang tertentu. Sehingga jika dibandingkan antara teori dan praktek, mata kuliah praktek lebih dominan dengan laboratorium yang lebih lengkap dengan bobot lebih dari 50%.

Bentuk pendidikannya lebih banyak praktek baik di kelas, laboratorium maupun di industri (lapangan). Bentuk kelas dan kegiatan pembelajaran dibuat sedekian rupa menyerupai tempat bekerja nanti, sehingga mahasiswa sudah tidak canggung lagi dalam melaksanakan tugasnya. Pada awalnya anak didik dibekali pengetahuan dasar, kemudian di bawa ke laboratorium untuk praktek. Setelah praktek kemudian dievaluasi mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan. Setelah dievaluasi mahasiswa dibawa praktek lagi di laboratorium sampai betul-betul anak didik menguasai betul apa yang sedang dipelajari.

Setelah dianggap cukup, anak didik di bawa ke lapangan dalam bentuk on the job training di industri kepariwisataan. Pada prinsipnya anak-anak disuruh melakukan praktek, tetapi jika dilakosi on the job, bukannya praktek tetapi melakukan kegiatan yang sesungguhnya, karena yang dilayani adalah para tamu yang betul-betul sedang berkunjung dan menikmati kawasan wisata/rekreasi. On the job training di lembaga vokasi dilakukan dua kali agar betul-betul siap pakai.

MODEL PENDIDIKAN DI PENDIDIKAN AKADEMIK

Pendidikan kepariwisataan di lembaga pendidikan akademik agak berbeda dengan pendidikan di lembaga pendidikan vokasi. Di lembaga pendidikan akademik porsi praktek lebih sedikit ketimbang di lembaga vokasi. Mengapa demikian ? karena mereka disiapkan untuk menjadi pemikir atau manajer di suatu kawasan wisata. Sehingga dalam proses pembelajaran lebih banyak pada aspek problem based learning (PBL) dan berbasis research.

Model semacam ini nampaknya secara keterampilan dianggap tidak siap, tetapi apabila di suatu industri kepariwisataan mengalami persoalan yang complicated anak-anak vokasional tidak akan sanggup mengatasi tetapi harus oleh anak-anak yang memiliki latar belakang pendidikan akademik. Sebagai contoh jika suatu kawasan wisata mengalami penurunan tingkat kunjungan wisata apa yang harus dilakukan ? Jika mengalami gangguan dengan masyarakat sekitar apa yang harus dilakukan ? Kebijakan apa yang harus diambil agar tingkat kunjungan wisata terus meningkat ? Bagaimana cara menempatkan SDM agar usaha kepariwisataan efektif dan efisien ? Apakah perlu perluasan usaha mengingat pengunjung terus meningkat ? dan beberapa pertanyaan lain yang tidak mudah untuk di jawab.

Model-model pertanyaan semacam itu harus menjadi bahan kajian dalam membina mahasiswa bidang pendidikan akademik. Tetapi walaupun demikian bukan berarti pendidikan akademik tidak memerlukan praktek di laboratorium atau lapangan. Praktek masih tetap diperlukan sebagai kemampuan dasar dalam menekuni bidang pekerjaan tertentu sebagai modal awal untuk memasuki dunia kerja. Sambil terus berproses sampai pada posisi yang sebenarnya yaitu sebagai manajer dalam bidang usaha kepariwisataan.

PENUTUP

1. Kepariwisataan sudah diakui sebagai suatu ilmu mandiri dan dapat dibuka untuk jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 di Indonesia, karena dari aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi telah memenuhi syarat sebagai ilmu yang harus dikembangkan.

2. Dibukanya bidang pendidikan akademik (S1 sampai S3), bukan berarti pendidikan vokasi (D1 sampai D4) kemudian dihapuskan. Karena ada perbedaan orientasi antara pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik. Pendidikan vokasi diarahkan untuk memasuki dunia kerja yang sifatnya operasional, sedangkan pendidikan akademik diarahkan untuk memasuki dunia pengembangan dan penelitian yang sifatnya pemikir dan manajerial.
3. Model pendidikan menengah ke depan akan menggunakan paradigma yang terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pendidikan vokasi (SMK) akan lebih banyak (sekitar 80%) sedangkan pendidikan akademik (SMA) hanya sekitar 20%.
4. Pendidikan Kepariwisatahan harus dimulai dari tingkat pendidikan dasar dan menengah sampai ke perguruan tinggi. Mengingat kepariwisatahan sangat terkait dengan bidang lain secara komprehensif, sehingga perlu adanya kesadaran dari para generasi muda tanpa harus mengorbankan moral dan budaya yang selama ini dianut.
5. Model pendidikan kepariwisatahan di tingkat dasar sampai menengah lebih diarahkan pada aspek afektik dan psikomotor dalam bentuk study tour ke daerah sekitar yang mudah dijangkau agar dapat menumbuhkan semangat mencintai dan menghargai lingkungan dan karya seni yang tumbuh didaerahnya.
6. Model pendidikan vokasi lebih diarahkan pada pembekalan keterampilan pekerjaan operasional, sehingga siap pakai dan bentuk pembelajarannya lebih besar dalam bentuk praktek di laboratorium atau lapangan (on the job training).
7. Model pendidikan akademik lebih diarahkan pada pembekalan kemampuan untuk pengembangan dan penelitian agar dapat mengatasi berbagai persoalan yang sifatnya complicated. Bentuk pembelajarannya lebih banyak bersifat manajerial konseptual dengan model problem based learning dan based research.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim. 2006. Laporan tahunan 2006. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta.
2. Ardike, I., G. 2008. Paradigma Baru Kepariwisata Indonesia. Seminar Nasional Membangun Kawasan Pantai melalui gerakan bersih pantai dan laut. BPU UPI. Bandung.
3. Ardike, I., G. 2007. Pokok-pokok Pikiran Landasan RUU Kepariwisata. Panja RUU Kepariwisata-Komisi X DPR-RI. Jakarta.
4. Azahari, A. 2008. Pendidikan Profesi Pariwisata. Hildiktipari Grand Melia Hotel. Jakarta.
5. Bachri, T., B. 2007. Arah Kebijakan dan Program Pemasaran Pariwisata Nasional. Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta.
6. Budhyana, I. 2008. Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan Kawasan Wisata di Jawa Barat. Seminar Nasional Membangun Kawasan Pantai melalui gerakan bersih pantai dan laut. BPU UPI. Bandung.
7. Darsiharjo dkk, 2006. Pengembangan model kurikulum Manajemen Resort & Leisure Kaitannya dengan Relevansi Dunia Kerja Lulusannya. Hibah Kompetitif FPIPS-UPI. Bandung.
8. Himawan B dan Kusmayadi. 2008. Peranan pariwisata sebagai ilmu mandiri dalam pengembangan pendidikan Vokasi. Hildiktipari Grand Melia Hotel. Jakarta.
9. Marpaung, H., dan Bahar, H. 2002. Pengantar Pariwisata. Penerbit Alfabeta. Bandung.
10. Pitana, IG. dan Gayatri, P., G. Sosiologi Pariwisata. Penerbit Andi. Yogyakarta.
11. Pitana, IG., dkk. 2007. Rancang Bangun Pariwisata Sebagai Ilmu Mandiri. Workshop Tindak Lanjut. Hotel Cemara. Jakarta.
12. Raharso, S., C Marihot. 2007. Citra Destinasi dan Konsekuensinya. Jurnal Pariwisata Stiepar Yapari Aktripa. Vol. 8 no 1. Bandung.
13. Sastrayuda, G., S. 2006. Pembangunan Kepariwisata pada Era Otonomi Daerah di Jawa Barat. Jurnal Manajemen Resort & Leisure Vol 2 no 2 Oktober 2006. UPI – Bandung.
14. UU No. 32 Tahun 2004. Undang-Undang Otonomi Daerah. Penerbit Fokusmedia. Bandung.
15. Wahab, S. 1996. Manajemen Kepariwisata. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
16. Yoeti, O., A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Penerbit Angkasa. Bandung.
17. Akehurst, G. 1998. Community-oriented tourism strategy development. John Wiley & Sons Ltd. Eglan.